

Beritasatu Photo / Uthan A Rachim

**Bagikan Dividen**

Presiden Direktur PT KINO Indonesia Tbk Harry Sanusi (kanan) berbincang dengan Presiden Komisaris Alfonso Djakarta Rahardja (kedua kanan), Direktur Operasional Rody Teo dan Direktur Keuangan Peter Chayson (kiri) di sela Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Public Expose di Jakarta, Rabu (25/5/2016). PT Kino Indonesia Tbk akan membagikan dividen sebesar 20% dari laba bersih Perseroan senilai Rp 52.857.145.500. Perusahaan ini telah menggunakan dana hasil IPO yang listing pada Desember 2015 lalu sebesar Rp 182,3 miliar untuk modal kerja dan sebesar Rp 4,6 miliar untuk belanja modal sampai dengan tanggal 31 Maret 2016.

SIAP LELANG 15 BLOK MIGAS

Pemerintah Buka Opsi Ubah Bentuk Kontrak Migas

Oleh Retno Auningtyas

► JAKARTA – Pemerintah membuka opsi untuk mengubah desain dasar bisnis minyak dan gas nasional, termasuk di dalam perubahan bentuk kontrak migas dari saat ini kontrak bagi hasil (*production sharing contract*/PSC). Hal ini guna menggenjot produksi minyak nasional yang saat ini terus turun hingga 15% per tahun.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, sejak 2000 lalu, produksi migas nasional terus turun dan belum menunjukkan tanda-tanda akan meningkat. Artinya, setelah krisis besar Asia, pemerintah belum memperbaiki sektor migas dengan baik. Padahal, kondisi dan asumsi yang ada sudah jauh berubah.

Untuk itu, pemerintah perlu melihat lagi bagaimana bisnis migas diatur, bukan sekadar menyerahkan perizinan saja. "Kita perlu masuk sampai ke desain dasar di sektor ini agar produksi migas kembali naik," tegas dia ketika membuka *The 40th IPA Convention and Exhibition 2016*, Rabu (25/5).

Perubahan desain kebijakan itu, lanjut dia, harus dilakukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bersama kementerian terkait lainnya. Perubahan tersebut ditargetkannya harus bisa disempurnakan dalam tahun ini juga. Pasalnya, Indonesia sudah tidak bisa menunda penyelesaiannya di tahun mendatang.

"Saya percaya, bersama dengan pengembangan ESDM dan pemilihan migas sebagai sektor prioritas, kita bisa sempurnakan (perubahan desain kebijakan) pada tahun ini juga," kata dia.

Darmin berharap *The 40th IPA Convention and Exhibition 2016* juga dapat menghasilkan usulan konkrit kepada pemerintah.

Menteri ESDM Sudirman Said mengakui bahwa perubahan-perubahan yang telah dilakukan pihaknya belum cukup untuk menggenjot investasi migas di tengah turunnya harga minyak mentah. Pasalnya, desain kebijakan sektor migas saat ini masih mengacu pada Undang-Undang No 22 Tahun 2001 yang sudah

berbeda acuan dengan kondisi saat ini.

"Maka silakan dicari bentuk lain kontrak migas selain PSC, menata split (bagi hasil) yang lebih sustainable, dan bagaimana agar hubungan pemerintah dan investor bisa long lasting," ujar dia.

Sementara itu, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM I Gusti Nyoman Wiratmaja menjelaskan, sejumlah insentif telah disiapkan oleh pihaknya. Rincinya, perpanjangan masa eksplorasi, fleksibilitas untuk mengganti jenis kegiatan eksplorasi yang menjadi komitmen, insentif bagi proyek laut dalam dan terencana, kemudahan mengakses data, dan cross PSC cost recovery eksplorasi pada satu blok.

"Yang masih perlu dibahas dengan kementerian lain yaitu insentif berupa *tax holiday*, serta FTP (*first tranche petroleum*) dan DMO (*domestic market obligation*) holiday. Sementara yang sudah berlaku yaitu *dynamic split* dan pembebasan PBB," papar dia.

Pihaknya menargetkan, seluruh insentif itu bisa berlaku diberikan ke investor pada kuartal ketiga tahun ini. Saat ini, pemerintah tengah menyusun payung hukum yang menjadi dasar dalam pembe-

rian insentif tersebut.

Perbanyak Lelang Blok

Menurut Wiratmaja, segala perubahan desain kebijakan dan pemberian insentif itu diperlukan agar ada temuan migas baru dan membuat proyek migas lebih ekonomis. Saat ini, Indonesia memiliki cadangan migas hingga 21,5 miliar barel. Sayangnya, sebagian besar cadangan ini tidak ekonomis dikembangkan dengan skema bisnis dan kebijakan migas nasional saat ini. Padahal jika cadangan ini bisa diproduksi, maka laju penurunan produksi migas nasional bisa ditekan. "Ke depan produksi migas itu turunnya 15-18% per tahun. Kami inginnya *decline rate* ini bisa ditekan menjadi sekitar 8-10% per tahun saja," kata dia.

Bersamaan dengan berbagai perbaikan yang dilakukan, lanjut dia, pemerintah juga akan lebih agresif dalam menawarkan blok migas. Hal ini juga dimaksudkan agar ditemukan cadangan migas baru di Indonesia. Pada lelang periode pertama tahun ini, pemerintah akan melelang 15 blok migas konvensional dan nonkonvensional. Jumlah blok yang dilelang ini masih akan ditambah lagi sampai akhir tahun.

"Nanti ada lelang periode kedua sekitar Oktober, berupa blok yang dilelang masih dibahas," tutur Wiratmaja. Ke depannya, pemerintah akan lebih banyak menawarkan blok migas ke investor.

Sayangnya, Wiratmaja mengakui tidak haval berupa potensi produksi dari blok-blok migas yang dilelang tahun ini. Namun, dari 15 blok yang dilelang pada periode pertama ini, disebutnya beberapa blok memiliki potensi produksi cukup besar. "Ada beberapa kalau discovery, nanti ada yang besar (produksinya)," ujarnya.

Daftar Blok Migas Tahap Pertama 2016**Lelang Reguler Blok Migas Konvensional**

1. South CPP
2. Oti
3. Suremana I
4. Manakarra Mamuju
5. South East Mandar
6. North Arguni
7. Kasuri II

Lelang Penawaran Langsung Blok Migas**Konvensional**

1. Bukit Barat
2. Batu Gajah Dua
3. Kasongan Sampit
4. Ampuh
5. Ebuny
6. Onin
7. West Kaimana

Lelang Reguler Blok Migas Nonkonvensional

1. Batu Ampar

Ke-15 blok migas itu rincinya yakni 14 blok migas konvensional dan 1 blok migas nonkonvensional. Sebanyak 7 blok migas konvensional ditawarkan melalui lelang reguler, sementara 7 blok lagi melalui penawaran langsung. Sementara 1 blok migas nonkonvensional ditawarkan melalui lelang reguler.

Untuk menggaet investor baru, pemerintah juga akan mengubah konsep lelang migas pada tahun ini menjadi *open bid split*. Dengan model ini, peserta lelang bebas memberikan penawaran terhadap besaran bagi hasil dan bonus tanda tangan. Pemerintah akan memilih penawaran terbaik dengan batasan tertentu terhadap *owner estimate* yang telah ditetapkan. Sebelumnya, bagi hasil dan bonus tanda tangan ditetapkan sepihak oleh pemerintah.

Sejauh ini, lanjut Wiratmaja, sejumlah perusahaan berminat menggarap blok-blok migas tersebut. Hal ini lantaran sebanyak tujuh blok migas ditawarkan melalui penawaran langsung. Artinya, telah ada perusahaan yang sebelumnya melakukan joint study di ketujuh blok tersebut.

Selain perusahaan pelaksana *joint study*, PT Pertamina (Persero) dan ExxonMobil juga menyatakan akan mengevaluasi blok-blok migas yang ditawarkan oleh pemerintah pada tahun ini.

Vice President Public and Government Affairs ExxonMobil Cepu Limited Erwin Maryoto mengungkapkan, pihaknya tetap melihat peluang mengembangkan blok migas lain di Indonesia. Apalagi, saat ini ExxonMobil hanya menggarap satu blok produksi, yakni Blok Cepu.

"Kami selalu mengevaluasi blok migas yang ditawarkan. Kalau ada yang sesuai dengan keinginan, kami akan partisipasi (dalam lelang)," kata dia.

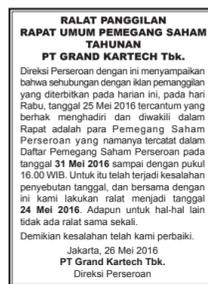
Staf Ahli Direktur Utama Pertamina Ausi B Gautama juga mengungkapkan hal yang sama. Menurutnya, Pertamina selalu berupaya untuk meningkatkan dan memperbaiki portofolio yang dimilikinya. Karenanya, Pertamina selalu terbuka terhadap peluang bisnis migas yang ada. "Peluang bisnis apapun yang menarik, tentu kami pelajari. Kalau bermanfaat untuk Pertamina yang artinya juga untuk Indonesia, pasti kami lakukan (ikut lelang)," tutur Ausi.

hanya berlangsung selama tiga puluh menit.

Ditemui usai pertemuan itu, Rachmat enggan berbicara banyak terkait akuisisi saham. Dia hanya menyebut pemegang saham NNT masih terus melakukan komunikasi dengan pihak-pihak yang tertarik melakukan akuisisi. Namun hingga kini belum ada keputusan final terhadap akuisisi tersebut. "Buat kami sebagai manajemen, fokus kami hanya memastikan operasi berjalan secara lancar sesuai dengan rencana yang sudah dibuat tahun ini," jelasnya.

Berdasarkan catatan *Investor Daily*, rencana akuisisi NNT diungkap kali pertama oleh Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli pada akhir November 2015 silam. Rizal menyebut

Panigoro akan mengambil alih 76 persen saham NNT. Rumor akuisisi kembali merebak pada Maret 2016 kemarin seiring pertemuan antara Panigoro dengan Presiden Joko Widodo. (rap)



PTBA Siap Bangun PLTU Sumsel 8

JAKARTA – PT Tambang Batu Bara Bukit Asam Tbk (PTBA) bakal segera memulai pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sumsel 8 kapasitas 2x620 MW, setelah ada komitmen PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) proyek transmisi HVDC 500 kV Sumatera-Jawa.

"Proyek kami ini memang sangat bergantung pada komitmen PLN, karena nilai keekonomian proyek ini jika dibangun transmisi HVDC," kata Direktur Utama PTBA Arviyan Arifin, di kantornya, Selasa (24/5).

Menurut Arviyan, proyek ini sebenarnya sudah *groundbreaking* sejak tahun lalu, sudah ada penunjukan kontraktor, bahkan pembebasan lahannya sudah 100%. "Cuma sekarang kita belum bisa mulai, karena PLN sempat menyatakan akan menunda sejumlah proyek, termasuk HVDC. Namun, kabar baik datang dari pemerintah bahwa proyek ini tetap dilanjutkan," katanya.

Sebelumnya, pemerintah memastikan bahwa proyek transmisi HVDC 500 kV Sumatera-Jawa akan dibangun. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam draf Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2016 – 2025. Selain proyek transmisi tersebut, proyek PLTU MT Sumsel 9 dan 10 juga tetap dicantumkan. Demikian juga dengan pengembangan PLTU Jambi 2x600 MW tetap dapat dikembangkan dan dicantumkan dalam RUPTL.

"Itu kan persyaratan dalam membahas RUPTL. Proyek yang sudah *on going* dan pendanaannya sudah pasti, harus jalan," kata Direktur Pembinaan Program Ketena-galistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Alihuddin Sitompul di Jakarta, Selasa (25/5).

Di bangunan kabel bawah laut HVDC Sumatera-Jawa itu disebutnya sesuai dengan kebijakan makro pemerintah. Pemerintah ingin mendorong agar sumber energi di Sumatera memiliki nilai tambah. Salah satu solusinya yakni batubara di Sumatera dimanfaatkan untuk memproduksi listrik untuk selanjutnya dibawa ke Jawa.

Hal senada dikemukakan Kepala Divisi Perencanaan Sistem PLN Adi Priyanto mengungkapkan, perseroan tetap akan mel-



■ Arviyan Arifin

anjutkan pembangunan HVDC Sumatera-Jawa. "Akan dilanjutkan karena ada dalam RUPTL," ujarnya.

Pasok 15%

Arviyan mengungkapkan bahwa PTBA punya potensi cadangan batu bara hingga 8 miliar ton yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan pembangkit listrik. "Karena bagaimana pun untuk membangun PLTA dulu ditambah energi yang dihasilkan lebih murah daripada membangun PLTU di luar mulut tambang. Karena ini masalah transportasi," katanya.

Dengan potensi tersebut, pihaknya mampu menggenjot kapasitas listriknya hingga 5.000 MW, atau sekitar 15% dari total proyek 35.000 MW.

"Dalam rencana kita, kita sudah mempunyai *business plan*, analisa kita bahwa Bukit Asam mempunyai kemampuan menyediakan *power plant* sampai kapasitas 5.000 MW. Kalau kita bicara program pemerintah 35000 MW, paling tidak 15% bisa dipenuhi oleh Bukit Asam," katanya.

Dia optimistis karena menurutnya, dari sisi cadangan batu bara, lokasi, pembebasan lahan itu sangat memungkinkan bagi PTBA untuk mencapai kapasitas listrik sebesar itu. "Oleh karena itu, kita sudah mulai ke arah sana. Pertama, kita sudah mempunyai pembangkit 2x100 MW di Banjarsari yang kita jual ke PLN Mulut Tambang.

PLTU Sumsel 8 ini akan memanfaatkan batubara di lokasi tambang batubara milik PTBA di Unit Pertambangan Tanjung Enim (UPE), Muara Enim.

Pasokan batubara untuk pembangkit tersebut sebanyak 5,4 juta ton sepenuhnya dari tambang Bukit Asam di Tanjung Enim. PT Huadian Bukit Asam Power merupakan perusahaan patungan yang dibentuk Bukit Asam dengan China Huadian Hongkong Co Ltd (CH DHK) dengan nilai proyek sebesar US\$ 1,6 miliar. Bukit Asam memiliki 45% saham pada Huadian Buld.t Asam Power. Sisanya 55% dikuasai oleh China Huadian Hongkong, yang merupakan anak usaha dari China Huadian Corporation, perusahaan pembangkit listrik milik Pemerintah Tiongkok. (es)



PT PERDANA GAPURAPRIMA Tbk PEMBERITAHUAN KEPADA PEMEGANG SAHAM TENTANG JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2015

Sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Perdana Gapuraprima Tbk ("Perseroan") tanggal 20 Mei 2016 bertempat di Jakarta, dengan ini disampaikan bahwa Perseroan akan membagikan Dividen Tunai Final Tahun Buku 2015 dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah Saham Beredar	: 4.276.655.336
Jumlah Dividen Per saham	: Rp. 5.-
Jumlah Dividen Tahun Buku 2015	: Rp.21.383.276.680.-

Sehubungan dengan hal tersebut Perseroan mengumumkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai sebagai berikut :

A. Jadwal Pembagian Dividen Tunai :

Kegiatan	Tanggal
Cum Dividen Tunai Pada Pasar Reguler dan Negosiasi	27 Mei 2016
Ex Dividen Tunai Pada Pasar Reguler dan Negosiasi	30 Mei 2016
Cum Dividen Tunai Pada Pasar Tunai	01 Juni 2016
Ex Dividen Tunai Pada Pasar Tunai	02 Juni 2016
Daftar Pemegang Saham Berhak Atas Dividen Tunai (Recording Date)	01 Juni 2016
Pembayaran Dividen Tunai	23 Juni 2016

B. Tata Cara Pembagian Dividen Tunai :

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham Perseroan.
2. Dividen Final akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 01 Juni 2016 pukul 16:15 WIB atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT. Kustodian Sistem Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan pada tanggal 01 Juni 2016 (selanjutnya disebut "Pemegang Saham Yang Berhak").
3. Pembayaran Dividen Final :
 - a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang namanya berada pada Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) maka pembayaran dan pendistribusian akan dilakukan oleh KSEI melalui Pemegang Rekening di KSEI.
 - b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang namanya masih menggunakan warkat (fisik), pembayaran dividen final akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) ke rekening Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberikan nama bank serta nomor rekening atas nama Pemegang Saham Yang Berhak secara tertulis dan bermaterai Rp.6.000.- kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT. Sinaratama Gunita ("BAE"), Plaza BII Menara 1 Lantai 9 Jl. MH Thamrin No.51, paling lambat tanggal 01 Juni 2016 pukul 16:15 WIB dengan disertai fotokopi KTP atau paspor, dan alamat yang tertera dalam KTP atau paspor tersebut harus sesuai dengan alamat yang tertera dalam Daftar Pemegang Saham.
4. Dividen final yang akan dibayarkan tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku :
 - a. PPh Final pasal 4 ayat (2) sebesar 10% untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri
 - b. PPh pasal 23 sebesar 15% untuk Wajib Pajak Badan Hukum Dalam Negeri yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - c. PPh pasal 23 sebesar 30% untuk Wajib Pajak Badan Hukum Dalam Negeri yang tidak memiliki NPWP.
5. Khusus bagi :
 - a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI (untuk Pemegang Saham yang namanya berada/tercatat dalam penitipan kolektif KSEI) atau Biro Administrasi Efek (BAE) PT Sinaratama Gunita (bagi Pemegang Saham yang menggunakan warkat) paling lambat pada tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan pukul 16.15 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Badan Hukum Indonesia akan dikenakan PPh sebesar 30%.
 - b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Warga Negara Asing dan merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Negara Republik Indonesia dan bermaksud untuk meminta agar pemotongan pajaknya disesuaikan dengan tarif yang tercantum dalam P3B tersebut wajib memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER/61 dan 62 tahun 2009, yaitu dengan menyerahkan/mengirimkan dokumen SKD (Surat Keterangan Domisili) yang ditetapkan dalam Lampiran II (Form-DGT1) atau Lampiran III (Form-DGT2), sebagai berikut :
 - Form-DGT1 asli khusus untuk Wajib Pajak Luar Negeri bukan Bank yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negaranya
 - Form-DGT2 asli khusus untuk Wajib Pajak Luar Negeri Bank atau fotocopy-nya yang telah dilegalisir oleh Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia apabila Form-DGT2 tersebut digunakan untuk beberapa perusahaan di Indonesia.
6. Bukti Potong Pajak dividen dapat diambil di:
 - a. KSEI melalui Pemegang Rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Saham (untuk Pemegang Saham yang namanya berada/tercatat dalam penitipan kolektif KSEI);
 - b. BAE Perseroan : PT Sinaratama Gunita, Plaza BII Menara 1 Lantai 9 Jl. MH Thamrin No. 51 Jakarta 10350 Telp : 021-3922332; Fax : 021-3923005 (bagi Pemegang Saham yang menggunakan warkat).

Jakarta, 26 Mei 2016

PT Perdana Gapuraprima Tbk
Direksi